

Tidak Dikembalikan

**PENGARUH PELAKSANAAN POLITIK ETIS TERHADAP  
KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT JAWA  
TAHUN 1901-1942**

**SKRIPSI**



Oleh :

*Suprayitno*

NIM : 8802105309

Asal :		Klass :
Terima :	1 MAR 1997	959.81
No. Induk :	971'78.4431	SUP

*ly*

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

Desember, 1997

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:**

1. Bapak-ibuku tercinta
2. Kakek-nenekku tersayang
3. Saudara-saudaraku yang tersayang
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan
5. Almamaterku yang kubangga-banggakan

PENGARUH PELAKSANAAN POLITIK ETIS TERHADAP KEHIDUPAN  
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT JAWA  
TAHUN 1801-1842

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan Tim Penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan spesialisasi Program Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Oleh:

Nama Mahasiswa : SUPRAYITNO  
NIM : 8802105309  
Angkatan Tahun : 1986  
Daerah Asal : Madiun, Jawa Timur  
Tempat dan Tanggal Lahir: Madiun, 13 Nopember 1967  
Jurusan / Program : Pendidikan Ilmu Pengetahuan  
Sosial / Pendidikan Sejarah

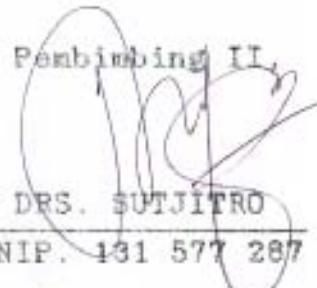
Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



DRS. H.M. SJAKIR HADIR, Ks. MSA  
NIP. 130 325 816

Pembimbing II,



DRS. SUTJITRO

NIP. 131 577 287

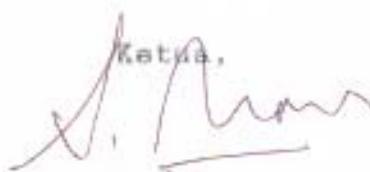
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi dan Diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Sebagai Skripsi.

Pada Hari : Senin

Tanggal : 5 Januari 1988

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Jember

Tim Penguji :



DRS. SUHARNO  
NIP. 131 403 352



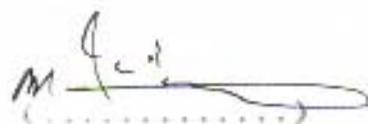
DRS. SUJITRO  
NIP. 131 577 287

Anggota :

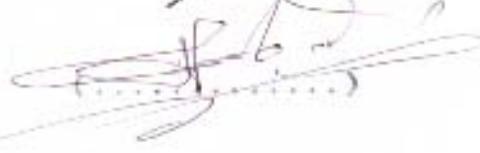
1. DRS. H. W. SJAKIR HADIE, K<sup>a</sup>. HSA  
NIP. 130 325 916

2. DRA. SRI HANDAYANI  
NIP. 131 472 786

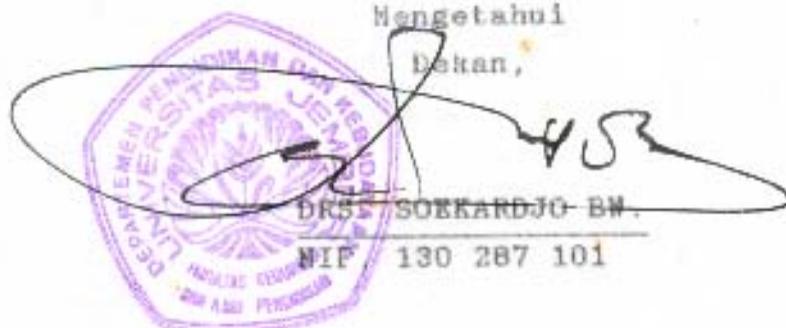
3. H. CHOESNOEL HADI, Spd  
NIP. 130 145 578







Mengetahui  
Dekan,



DRS. SOEKARDJO-BW.  
NIP. 130 287 101



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab dengan taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kecuali itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Jember;
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Kepala Lembaga Penelitian Universitas Jember;
4. Kepala Perpustakaan beserta Staf Universitas Jember;
5. Ketua Jurusan Pendidikan IPS - FKIP Universitas Jember;
6. Ketua Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember;
7. Pembimbing I dan II;
8. Semua Dosen FKIP Universitas Jember;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya dapat memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amal baik mereka diberi imbalan yang lebih besar oleh Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari, bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca, demi baiknya skripsi ini.

Jember, 5 Januari 1998

Penulis,

## RINGKASAN

Suprayitno, Desember 1987, Pengaruh Pelaksanaan Politik Etis Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jawa Tahun 1901-1942.

Skripsi, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP Universitas Jember.

Pembimbing : (1) Drs. H.M. Sjakir Hadie, Ks.MSA  
(2) Drs. Sutjitro

**Kata Kunci** : Pengaruh Politik Etis, Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jawa, Tahun 1901-1942.

Politik etis yang dikenal dengan sebutan politik balas budi merupakan salah satu dari upaya pemerintah Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di daerah koloni. Politik ini sebagai reaksi dari kegagalan sistem yang pernah digunakan oleh pemerintah Belanda. Pelaksanaannya mulai tahun 1901 hingga 1942, hasil usulan dari C.Th. Van Deventer yang dibacakan Ratu Belanda Wilhelmina di depan sidang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Dilaksanakan melalui tiga bidang yaitu; pendidikan, irigasi dan transmigrasi. Bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pribumi, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan-penyimpangan. Sebagai hasil pengaruh dari politik etis terhadap kehidupan masyarakat Jawa dalam kehidupan sosial budaya, yaitu dengan ditandai munculnya kaum elit birokrasi dalam stratifikasi masyarakat Jawa, diperbaharukannya Undang-Undang Agraria (dalam hal sewa menyewa tanah) serta munculnya golongan intelektual dalam masyarakat.

Pernmasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pelaksanaan politik etis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa tahun 1901-1942 ?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap secara jelas dan mendalam tentang pengaruh politik etis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa mulai tahun 1901-1942. Manfaat yang diharapkan, antara lain; (1). bagi penulis, penelitian ini dapat melatih diri dalam melakukan suatu penelitian serta untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pengembangan dan memperluas wawasan pengetahuan; (2). bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah wawasan pengetahuan dalam rangka mempelajari ilmu sejarah khususnya mengenai sejarah Nasional Indonesia;

(3). bagi almamater, merupakan bagian salah satu dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini akan menambah khasanah kepustakaan di Universitas Jember khususnya tentang sejarah;

(4). bagi para pembaca umumnya, suatu hasil penelitian akan menambah pengetahuan serta pengalaman tentang pengaruh pelaksanaan politik etis terhadap dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa.

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Nopember 1996 sampai dengan bulan Maret 1997, dengan cara mengadakan studi literatur, sehingga tempat penelitian yang akan dipakai adalah perpustakaan, sebagai tempat penelitian yaitu: Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember dan Laboratorium Program Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember. Upaya yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari permasalahan diawali dengan mengadakan pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumenter, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode filosofik berdasarkan teknik logika induktif dan teknik logika komparatif.

Berdasarkan metode di atas, maka hasil dari analisis data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari pelaksanaan politik etis pada kehidupan masyarakat Jawa dapat terlihat dalam bidang sosial budaya, misalnya ; munculnya golongan intelektual pada masyarakat Jawa dan munculnya kaum elit birokrasi dalam kehidupan masyarakat pribumi.

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan kesimpulan di atas adalah; bagi peneliti sejarawan, bahan yang terdapat dalam penelitian ini dirasakan masih jauh dari sempurna, maka himbauan dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini; bagi calon guru, hendaknya tetap selektif terhadap-bahan materi pelajaran yang berasal dari buku-buku sejarah dengan harapan tanpa dipengaruhi sikap subyektif pribadi sehingga sesuai dengan harapan yang hendak dicapai.

Indonesia Dalam Abad Ke XVIII sampai 1910



Sumber : Muh. Yamin, 1956, Atlas Sejarah, Djambatan, Djakarta

KETERANGAN :  
Belanda

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
RINGKASAN .....	vi
PETA .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan ...	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul .....	4
1.2.1 Pengaruh .....	5
1.2.2 Politik Etis .....	5
1.2.3 Kehidupan Sosial Budaya .....	6
1.2.4 Masyarakat Jawa .....	6
1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan ..	7
1.3.1 Ruang Lingkup .....	7
1.3.2 Rumusan Permasalahan .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	8

### BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Latar Belakang Lahirnya Politik Etis ....	10
2.2 Pelaksanaan Politik Etis .....	14
2.3 Pengaruh Politik Etis Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jawa .....	17
2.4 Hipotesis .....	22

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pengertian Metode Penelitian .....	24
3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah ....	26
3.2.1 Heuristik .....	27
3.2.2 Kritik .....	28
3.2.3 Interpretasi .....	30
3.2.4 Historiografi .....	31
3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian .....	32
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	33
3.5 Metode Analisis Data .....	34
3.5.1 Teknik Logika Komparatif .....	35
3.5.2 Teknik Logika Induktif .....	36

### **BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Latar Belakang Lahirnya Politik Etis.....	38
4.1.1 Situasi Pemerintah Kolonial .....	39
4.1.2 Ide Lahirnya Politik Etis .....	42
4.2 Pelaksanaan Politik Etis .....	44
4.2.1 Bidang Pendidikan .....	44
4.2.2 Bidang Transmigrasi .....	46
4.2.3 Bidang Pengairan (irigasi) .....	48
4.3 Pengaruh Pelaksanaan Politik Etis Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jawa .	49
4.3.1 Bidang Sosial .....	50
4.3.2 Bidang Budaya .....	53

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran .....	55

### **KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian.
2. Permohonan Ijin Studi Literatur.
3. Daftar Riwayat Hidup

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Setelah organisasi dagang pemerintah Belanda yang diberi nama Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) mengalami kemunduran dan bangkrut yang mengakibatkan dibubar-kannya pada tahun 1798, kemudian dilanjutkan dengan sistem tanam paksa yang berlangsung dari tahun 1830-1870 (Marwati Djoened Poesponegoro,dkk, 1992:1).

Mengenai sistem tanam paksa pada dasarnya sama seperti kegiatan yang dilakukan VOC, yaitu berusaha mengeksploitasi hasil bumi dengan mengumpulkan upeti selain itu juga memperoleh keuntungan yang sangat besar dari perdagangan (Suhartoyo Hardjosatoto, 1985:87). Hal ini juga dijelaskan oleh Marwati Djoened Poesponegoro bahwa tanam paksa (cultuur stelsel berarti pemulihan sistem eksploitasi yang berupa penyerahan wajib dan pernah dilakukan oleh organisasi VOC) (1992:2).

Sistem tanam paksa membawa keuntungan dipihak pemerintah Belanda sehingga hutang yang diderita oleh negara induk (negeri Belanda) dapat terlunasi dan membawa kemajuan pada industri perkapalan yang nantinya akan berpengaruh dalam hubungan perdagangan (Suhartoyo Hardjosatoto, 1985:89). Bagi masyarakat Indonesia mengalami penderitaan dan sengsara, sebagai akibat tindakan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda dengan mengurus semua hasil. Sebagai akibat yang dialami oleh pemerintah kolonial Belanda yang memperoleh keuntungan yang melimpah nantinya mengalami kehilangan kontrol dalam bertindak dalam bertindak, akhirnya pada taun 1870 sistem tanam paksa tersebut dibubarkan dengan alasan rasional ekonomis (Robret Van Niel, 1984:18). Maksudnya yaitu suatu alasan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, misalnya ; tekanan korupsi, yang merupakan tekanan dari pengusaha-pengusaha swasta dan

berusaha untuk mencari keuntungan diri sendiri.

Kemudian sistem tanam paksa diganti dengan sistem politik liberal, hal ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan perusahaan dan mengadakan perdagangan bebas. Sistem ini tetap membawa keuntungan bagi pihak pemerintah kolonial Belanda tetapi pemerintah Belanda tidak menduga bahwa dengan adanya kebebasan untuk mendirikan perusahaan tersebut, yang semula sebagai kegiatan yang bercita-cita sosial dan ekonomi nantinya akan menjadi kata lain dari tindakan eksploitasi kapitalis (Sartono Kartodirdjo, 1993:25). Bahkan sistem ini membentuk suatu eksploitasi yang lebih tinggi. Pelaksanaannya sejalan dengan pemikiran Van Deventer yang menyebutkan politik drainage (yaitu politik pengeringan atau pengerukan kekayaan) serta tidak meninggalkan sedikitpun kegiatan untuk membina kehidupan penduduk (Leirissa, 1985:22). Sistem politik ini nantinya akan berakibat buruk pada perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia, hal ini terbukti keadaan perekonomian masyarakat Indonesia mengalami porak-poranda.

Setelah mengetahui keadaan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang semakin memburuk saat dilaksanakan politik liberal, maka pemerintah Belanda mulai memberi sedikit kelonggaran dalam bertindak untuk masyarakat daerah kolonialnya. Menurut Akira Nagazumi dijelaskan bahwa pemerintah Belanda mulai memberi jalan pemikiran yang lebih manusiawi dalam bertindak khususnya yang berkaitan dengan daerah jajahannya (1986:26). Sebagai bukti bahwa pemerintah Belanda berusaha memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi yang dirasa sangat jauh tertinggal yaitu dengan dijalankan politik etis. Usaha ini juga tidak lepas dari pertimbangan beberapa kritikan yang dilontarkan melalui tulisan dari karya beberapa tokoh bangsa Belanda seperti: Baron Van Hovel, Broofhooft, P.H. Van Hol, C.Snouck Hurgronge dan C.Th. Van Deventer. Perlu

diketahui bahwa dari beberapa hasil karya tersebut yang mendapat tanggapan hanya tulisan dari Van Deventer, oleh ratu Wilhelmina di depan sidang Staten General (Parlemen) pada tahun 1901 (Robret Van Hiel, 1984:51). Konsep dari C.Th. Van Deventer tersebut mengemukakan tentang diadakan politik balas budi atau sering disebut dengan politik etis.

Politik etis ditetapkan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah koloni bangsa Belanda (khususnya bangsa Indonesia). Dilaksanakannya politik etis ini bukan karena merupakan hasil usulan dari Van Deventer belaka tetapi adanya faktor yang lain yaitu konfigurasi politik dalam negeri Belanda juga mempengaruhi dilaksanakannya politik etis tersebut (Leirissa, 1985:23).

Disamping itu politik etis tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah tarap hidup keadaan masyarakat. Hal ini dikenal dengan sebutan trilogi Van Deventer, yaitu perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia melalui bidang pendidikan, irigasi dan transmigrasi (Sartono Kartodirdjo, 1983:95). Setelah pelaksanaan politik etis nantinya berakibat negatif bagi bangsa Indonesia, hal ini terlihat dari beberapa aspek kehidupan sosial budaya mengalami kemerosotan. Sebagai dampak dari pelaksanaan politik etis yang menyimpang dari ketentuan yang sebenarnya, sehingga semakin meningkatkan keuntungan bagi pemerintah Belanda dan menurunkan derajat kehidupan masyarakat kolonial (bangsa Indonesia). Selain adanya dampak negatif terdapat pula dampak yang positif yaitu ditandai munculnya peningkatan kualitas dan kuantitas dari golongan intelektual dalam kehidupan masyarakat yang nantinya akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat Indonesia. Maksudnya dampak pengaruh dari hasil pelaksanaan politik etis nantinya akan membawa pengaruh dalam perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul "Pengaruh Pelaksanaan Politik Etis Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Jawa Masyarakat Jawa Tahun 1901-1942".

Setelah mengetahui latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulisan hasil penelitian ini juga didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain: 1) topik masih dalam jangkauan peneliti, 2) tersedianya sumber yang cukup untuk dipakai sebagai acuan, 3) topik sangat menarik untuk diteliti, 4) topik cukup penting untuk diteliti karena dapat melengkapi koleksi karya tulis dalam bidang sejarah khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan politik etis di Indonesia, 5) kesediaan dari dosen pembimbing untuk membimbing penulis dalam penelitian ini.

## **1.2 Penegasan Pengertian Judul**

Penegasan pengertian judul dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena hal ini dapat mencegah terjadinya salah penafsiran ataupun kekaburan maksud dari judul tersebut. Sehingga dengan adanya penegasan pengertian judul diharapkan suatu hasil penelitian dapat dibatasi serta diketahui maksud dan tujuan dari penelitian dilakukan.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis berusaha memberikan penegasan dari judul penelitian ini yaitu Pengaruh Pelaksanaan Politik Etis Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jawa Tahun 1901-1942. Adapun istilah-istilah yang diberikan pengertian antara lain:

- 1) pengaruh;
- 2) politik etis;
- 3) kehidupan sosial budaya;
- 4) masyarakat Jawa, akan dijelaskan berikut ini:

### 1.2.1 Pengaruh

Kata pengaruh dapat diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari suatu (benda, orang dan sebagainya) yang berkuasa atau berkekuatan (W.J.S. Poerwodarminto, 1976:565). Lebih lanjut dijelaskan bahwa daya yang ada itu timbul dari sesuatu (orang dan benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang (Anonim, 1991:747).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata pengaruh merupakan suatu daya yang berkekuatan dan berkekuasaan, sehingga dengan adanya daya tersebut akan dapat menimbulkan serta berakibat berbagai perubahan.

### 1.2.2 Politik etis

Menurut Poespoprojo dijelaskan bahwa terbentuknya suatu politik etis disebutkan sebagai pengakuan pemerintah penjajah terhadap penetrasinya kepada masyarakat Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya yakni merupakan suatu masyarakat yang mengalami disintegrasi yang tak mungkin ternilai perahnya diselesa bidang kehidupan (1981:11). Sedangkan menurut H. Boudet dan I.J. Brugmans disebutkan bahwa politik etis merupakan misi suci dari negeri Belanda untuk negara kolonialnya (1987:6). Selain itu politik etis juga dapat diartikan sebagai hutang budi kehormatan (Leirissa, 1985:12). Politik Etis menurut Kansil dan Yulianto diartikan sebagai politik balas budi (budi baik) atau lazim dinamakan *etiche* politik (1993:12). Kata etis merupakan suatu kata benda yaitu etika yang mempunyai arti ilmu kesusilaan. Jadi politik etis dapat diartikan sebagai politik kesusilaan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik etis merupakan suatu politik kolonial Belanda dalam memperbaiki keadaan kehidupan masyarakat Indonesia atau semacam balas budi.

### 1.2.3 Kehidupan Sosial Budaya

Kata kehidupan berasal dari kata dasar hidup mendapat imbuhan ke-an yang mempunyai arti mengalami kehidupan dalam keadaan atau dengan cara tertentu (Anonim, 1991:351). Kata sosial memiliki arti berkenaan dengan masyarakat, maksudnya dalam kehidupan bermasyarakat orang atau manusia memiliki jiwa sosial (yaitu jiwa untuk selalu hidup saling membantu) (1991:958). Sedangkan menurut Edward Burnett Tylor kata budaya sering disebut dengan kebudayaan yang mempunyai arti suatu keseluruhan yang kompleks mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan segala kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (1990:495). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial budaya mempunyai maksud sesuatu yang mengalami dengan cara tertentu dalam hubungan kemasyarakatan sebagai hasil dari buah budi dan pikiran manusia.

### 1.2.4 Masyarakat Jawa

Pengertian masyarakat yaitu sejumlah kumpulan manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka sama (Depdikbud, 1991:635). Sedangkan menurut Hassan Sadily dijelaskan bahwa masyarakat merupakan golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertahan secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu dan lainnya (1993:47). Pengertian Jawa yaitu sebutan dari salah satu pulau di wilayah Indonesia yang didiami oleh suku bangsa Jawa (Anonim, 1989:368). Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan masyarakat Jawa merupakan sejumlah kumpulan manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan berbudaya serta terikat oleh suatu adat istiadat dan kehidupan bersama dalam satu pulau atau daerah Jawa biasanya disebut dengan suku Jawa.

### **1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan**

#### **1.3.1 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup sangat diperlukan dalam penelitian. Untuk mencapai sasaran penelitian yang sangat tepat, maka setiap penelitian diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa sekali suatu persoalan telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formula-si-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan tersebut. Maksudnya dengan langkah ini bagi peneliti dapat digunakan sebagai pedoman kerja dan bagi orang lain akan berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya keributan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan (1986:8). Lebih lanjut Koentjoringrat menjelaskan bahwa jika permasalahan sudah ditetapkan, maka perlu ditentukan ruang lingkungannya, hal ini sangat penting agar penelitian tidak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data yang ingin diteliti (1991:17).

Berdasarkan pendapat diatas, maka penelitian ini mengambil ruang lingkup waktu antara tahun 1900-1942. Mengenai angka tahun tersebut tidak dijadikan batasan yang mutlak karena dalam pembahasan nanti peneliti juga akan menyinggung peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tahun 1942 sebagai akhir dari penulisan.

Mengenai ruang lingkup tempat penelitian ini ditentukan hanya terbatas pada lingkungan kehidupan masyarakat Jawa, karena wilayah Jawa merupakan bagian utama dari kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini peneliti memusatkan pada masalah pengaruh pelaksanaan politik etis dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa.

#### **1.3.2 Rumusan Permasalahan**

Setiap pelaksanaan penelitian selalu bertitik tolak dari adanya suatu permasalahan yang dibahas. Hal ini

sesuai dengan pendapat Moh. Ali yang menjelaskan bahwa rumusan permasalahan dalam penelitian pada hakekatnya merupakan generalisasi ruang lingkup masalah, dimensi penelitian dan analisis variabel semua tercakup di dalamnya. Selain dari permasalahan merupakan segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya (1986:31 dan 36). Sedangkan menurut Winarno Surachmad dijelaskan bahwa permasalahan adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk mencari pemecahannya (1990:33).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan merupakan sesuatu pernyataan dari kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diharapkan sehingga perlu dicari jalan pemecahannya.

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana pengaruh pelaksanaan politik etis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa tahun 1900-1943?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Suatu aktifitas penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Menurut Sutrisno dijelaskan bahwa penelitian sejarah minimal harus mempunyai dua tujuan, yaitu: 1) memberikan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya tentang sejarah dan 2) membimbing dan mengajarkan mengupas setiap kerjasama sejarah secara kritis dan realitas (1975:22). Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh dari pelaksanaan politik etis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa tahun 1900-1942.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagi penulis, penelitian ini dapat melatih diri dalam melakukan suatu penelitian serta untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pengembangan ilmu dan memperluas wawasan pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh pelaksanaan politik etis dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya;
2. bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah wawasan pengetahuan dalam rangka mempelajari ilmu sejarah, khususnya mengenai sejarah nasional Indonesia;
3. bagi almamater, merupakan bagian salah satu dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini akan menambah khasanah kepustakaan di Universitas Jember;
4. bagi pembaca umumnya, suatu hasil penelitian akan menambah pengetahuan serta pengalsman, begitu juga penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan pengalaman tentang pengaruh pelaksanaan politik etis dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa tahun 1901-1942.

## BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### 2.1 Latar Belakang Lahirnya Politik Etis

Keadaan kehidupan masyarakat Indonesia pada abad ke-19 berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang memperlakukan sistem *culture stelsel*. Sistem ini mewajibkan para petani untuk menanam ladangnya dengan berbagi jenis tanaman yang hasilnya dapat dijual di pasar dunia. tetapi peraturan tanam paksa ini dalam praktek pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang memberatkan rakyat (Sartono Kartodirdjo, 1995:85). Sistem ini hanya menguntungkan pihak pemerintah Belanda, sebagai buktinya keuntungan yang diperoleh pihak pemerintah Belanda tempak pada tahun 1841-1863 dengan memperoleh laba sebesar 461 juta golden. Akibatnya bagi pemerintah Belanda dapat melunasi berbagai hutangnya dan kesulitan keuangan negeri Belanda dapat diatasi (Marwati Djoened Poesponegoro, 1929:9).

Hal ini tidak hanya memberi hasil bagi pemerintah, tetapi juga memberi dorongan untuk memajukan perdagangan dan pelayaran di negeri Belanda serta memperkaya pengusaha pabrik, pedagang-pedagang. Sebagai akibatnya mulailah timbul modal perdagangan dan modal industri perikelir (Sartono Kartodirdjo, 1993: 15).

Mengenai keadaan masyarakat Indonesia pada waktu itu mengalami penderitaan serta kemelaratan, karena semua potensi yang terdapat di Indonesia diambil oleh pemerintah Belanda. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil pekerjaannya dan diwajibkan untuk membayar pajak, selain itu tenaga rakyat dipaksa untuk kerja rodi di daerah perkebunan milik pemerintah Belanda (Moh. Ali, 1952: 39). Keadaan perekonomian rakyat sangat buruk dan kesehatan masyarakat mengalami kemerosotan, hal ini terus bertambah setelah panen padi

gagal karena beban pajak yang sangat memberatkan rakyat. Sehingga timbul bahaya kelaparan dan kematian, misalnya seperti yang terjadi di daerah Demak pada tahun 1848 dan di daerah Grobogan tahun 1849 (Suhartoyo Hardjosatoto, 1985: 89). Masyarakat Indonesia semakin menderita dan sengsara, sedangkan pemerintah Belanda nantinya dapat kehilangan kontrol sebagai akibat dari keuntungan yang berlimpah, maka akhirnya tahun 1870 VOC dibubarkan dengan alasan rasionalis ekonomis (Robert Van Niel, 1984: 19). Maksudnya alasan yang berkaitan dengan bidang ekonomi misalnya, tekanan korupsi, tekanan dari pengusaha-pengusaha swasta yang mencari keuntungan pribadi.

Golongan yang menginginkan dihapuskan sistem tanam paksa yaitu golongan humanis atau golongan liberal yang dipelopori oleh Baron Van Hovel yang membela rakyat Indonesia dengan melalui pidato-pidatonya di depan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Nederland (Sartono Kartodirdjo, 1993, 16 dan G. Moedjanto, 1988: 10)

Sebagai puncaknya reaksi dari golongan humanis mendapat pengaruh yang luas dikalangan pemerintah dan masyarakat Eropa yaitu munculnya tulisan dalam majalah Belanda *De Gids* yang ditulis oleh C. Th. Van Deventer. Artikel tersebut berjudul *Een Ereschuld* (hutang budi), yang berisi tentang himbauan terhadap pemerintah Belanda untuk membuat perhitungan keuangan bagi tanah jajahan yang kekurangan sebagai akibat ganti rugi laba yang di keruk dari daerah jajahan melalui sistem tanam paksa (Robert Van Niel, 1984: 21 dan Akira Nagazumi, 1989: 99).

Akibat rasa tidak puas terhadap politik yang sedang berjalan, maka sedikit demi sedikit sistem tanam paksa dihapuskan berkat perjuangan golongan kaum liberal atau golongan humanisme pada tahun 1865. Tahun 1865 dianggap batas akhir pelaksanaan politik liberal atau imperialisme modern (G. Moedjanto, 1988: 20). Pelaksanaan berlangsung

pada tahun 1870-1900, kemudian dilanjutkan dengan politik etis yaitu suatu politik yang dijalankan pemerintah Belanda untuk membantu kesejahteraan masyarakat pribumi akibat beban pajak yang berat dan penderitaan kelaparan akibat panen gagal. Mengenai pelaksanaannya mulai tahun 1901 sampai kedatangan bangsa Jepang di Indonesia.

Mengenai dilaksanakannya politik etis bukan hanya karena kemenangan dari golongan kaum humanisme atau golongan liberal yang berusaha untuk mengubah keadaan kehidupan masyarakat pribumi (Indonesia) dan diterapkannya tentang politik etis oleh Van deventer, tetapi karena konfigurasi dari situasi politik dalam negeri Belanda juga mendukung dilaksanakannya politik etis ini (Leirissa, 1985: 23). Maksudnya bahwa situasi politik di negeri Belanda juga mempengaruhi tentang dilaksanakannya politik etis, terutama dengan meluasnya paham liberal ke seluruh dunia akibat revolusi Perancis. Selain itu sebagai akibat dibubarkannya UU Negeri Belanda dan diganti menjadi liberal. Eubarnya UU tersebut maka memberi peluang pada penganut paham liberal untuk ikut campur dalam menangani pemerintahan, sehingga memberi peluang yang besar dalam menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik pemerintah.

Pernyataan-pernyataan dari golongan humanisme ini tampak rasional dan mampu mengubah pikiran pemerintah Belanda melalui kebijaksanaan yang dikeluarkan untuk menerima semua ide-ide yang dilontarkan oleh golongan liberal, karena mempunyai pandangan selain menerima keuntungan yang masuk ke dalam kas negara dan menjadikan semakin banyak, juga dengan politik etis ini akan menutupi atas kesalahan-kesalahan pemerintah Belanda dalam kehidupan masyarakat timur (Robert Van Niel, 1985: 21). Sebagai akibatnya Ratu Belanda dalam pidato tahunannya pada tahun 1901 mengungkapkan adanya kewajiban etis dan tanggung jawab moral terhadap keberadaan nasib masyarakat Hindia

Belanda (Poespoprojo, 1989:11). Politik etis sering juga disebut dengan politik balas budi dan politik kesusilaan. Etis berasal dari kata etika yang berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral) (Poerwadarminta, 1986: 287).

Politik etis merupakan suatu politik kolonial Belanda dalam rangka usaha memperbaiki keadaan nasib masyarakat bangsa Indonesia atau macam balas budi, setelah kurun waktu yang lama tanpa memperhatikan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai daerah jajahan pemerintah Belanda. menggunakan politik drainage, yaitu politik yang hanya mengambil keuntungan-keuntungannya saja tanpa memperhatikan kerugian-kerugian yang dideritanya. Pemerintah Belanda dengan menggunakan politik drainagenya dapat mengeksploitasikan potensi-potensi hasil bumi bagi daerah jajahannya (bangsa Indonesia), sehingga nantinya berakibat dalam kehidupan sosial yang sangat parah keberadaannya bagi rakyat Indonesia. Sebenarnya negara induk Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial ekonomi dari penduduk pribumi Indonesia (Suhartojo Hardjosatoto, 1985:95).

Penetapan pelaksanaan politik etis untuk dilaksanakan di daerah jajahan khususnya Indonesia oleh pemerintah Belanda karena adanya beberapa faktor pendorong yaitu: perkembangan situasi politik negeri Belanda, politik etis tidak lepas dari perubahan yang terjadi dalam struktur atau susunan pemerintahan negeri Belanda, selain itu juga karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Eropa dan dunia. Khususnya akibat dari meluasnya paham liberal setelah berlangseungnya revolusi Perancis; 2) adanya golongan yang memiliki kepentingan politik yang sama-sama menghendaki perubahan pola pemerintahan kolonial yaitu dari golongan liberal atau golongan humanis; 3) adanya usaha dari para pengusaha industri (kaum borjuis)

khususnya pengusaha kain Twente yang menginginkan ditingkatkannya kesejahteraan para petani pribumi sebagai kondisi sangat perlu tempat pemasaran hasil produksi (Robert Van Biel, 1984:J.M. Romein, 1956:137 dan Sartono Kato-dirdjo, 1985:96). Setelah mendapat pengaruh Aufklarung (jaman pencerahan) yang timbul pada abad ke-17 dan mempengaruhi perkembangan negara-negara Eropa Barat abad ke-18, maka timbul pemikiran untuk memperbaiki keadaan daerah jajahan Indonesia dengan perhatiannya hanya pada penyebaran agama Nasrani melalui sekolah-sekolah, tetapi bukan penyebaran pengajaran netral pada rakyat umumnya (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1956:119).

## 2.2 Pelaksanaan Politik Etis

Pelaksanaan politik etis pada awalnya dijalankan dengan semangat yang menyala-nyala dan adanya rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan hidup masyarakat pribumi. Ternyata mengenai pelaksanaannya sangat diragukan (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1992:76). Hal ini karena waktu saat dilaksanakannya sangat terbatas, lambat dan ragu-ragu sebab pelaksanaannya selalu dihalangi dengan penghematan dan rasa kuatir akan memberikan pengaruh politik kepada penduduk yang menjadi jajahan. Keadaan sosial tidak banyak mengalami perbaikan kemiekinan, buta huruf dan kurangnya kesehatan masih tampak jelas dalam kehidupan rakyat, bahkan dapat dikatakan bahwa pratiknya hanya didengung-dengungkan saja tetapi orang takut akan konsekwensi keuangan (Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. 1992:77).

Perlu diketahui bahwa politik etis mempunyai sasaran-sasaran yang terkenal dengan sebutan Trias Van Deventer, yaitu merupakan tiga sasaran utama dari politik etis yang meliputi bidang pendidikan, kependudukan dan pertanian. Hakaudnya melalui tiga hal yang menjadi sasaran tersebut

berusaha untuk memperbaiki kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia umumnya dan daerah Jawa khususnya. Pada hakekatnya sasaran-sasaran yang hendak dicapai hanya menguntungkan pihak pemerintah Belanda. Hal ini mempunyai maksud bukan memperbaiki dan mengangkat nilai-nilai moral yang sebenarnya, tetapi sebagai bentuk lain dari kolonialisme dan imperialisme yang pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme (C.S.T. Kansil dan Juhan, 1988:8).

Mengenai pengaruh dari pemerasan mulai tampak pada masa pemerintahan dipegang oleh Deandels dengan jabatan sebagai Gubernur Jendral ( I.DJumhur, dkk., 1956:119). Hal ini karena mendapat perintah dari Napoleon untuk meringankan nasib budak-budak serta orang bumi putera dan melemparkan perdagangan budak. Usaha yang dilakukan adalah memberikan perintah agar tiap-tiap distrik mempunyai tempat untuk sekolah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perintah ini muncul pada tahun 1808 yang diberikan kepada para bupati di seluruh pulau Jawa, tujuannya supaya pengajaran tersebar dikalangan rakyat yang pelaksanaannya dimulai tahun 1809 dan mendirikan pendidikan bidan di Batavia.

Pelaksanaan politik etis dapat dirasakan dalam berbagai bidang misalnya: 1) bidang irigasi karena sangat vital bagi pertanian, maka dilakukan pembuatan dan perbaikan saluran irigasi yang akan dipakai untuk mengairi tanah persawahan dan tanah perkebunan; 2) bidang transmigrasi, hal ini dilakukan karena jumlah penduduk di Jawa dan Madura pada tahun 1900 mengalami peningkatan serta adanya permintaan besar tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan Sumatera; 3) bidang ekonomi, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Belanda yaitu: mendirikan rumah-rumah pegadaian sejak tahun 1900; 4) bidang edukasi (pendidikan) dalam bidang ini ditandai adanya usaha pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah misalnya: sekolah kelas I, sekolah

kelas II dan sekolah untuk calon pamong praja (Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, 1992:38-45).

Mengenai perkembangan perekonomian baik keadaan di negeri Belanda maupun di negeri jajahan, sebagai berikut keadaan situasi di negeri Belanda pada tahun 1870 memasuki keadaan kapitalis modern. Sebagai akibat dari revolusi industri untuk bidang perdagangan berkembang dengan pesat serta diikuti dengan adanya perkembangan modal yang terus meningkat. Selain itu juga didukung adanya sistem perdagangan bebas dengan negara tetangga. Sedangkan untuk negeri jajahan (keadaan Hindia Belanda) antara tahun 1850-1870 mengalami periode transisi dari politik konservatif ke politik liberal (Sartono Kartodirdjo, 1993:22-23).

Kedaaan ini nantinya akan berakibat pada kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia setelah dibukanya sistem politik pintu terbuka. Dijelaskan oleh Van Deventer bahwa dengan diluncurkan politik pintu terbuka tersebut mendorong beroperasinya modal asing dan swasta untuk membuka tanah pertanian serta bidang perekonomian baik di Jawa dan di luar Jawa (Sumatera) (1985:33).

Sebagai pengaruhnya dalam bidang sosial budaya dapat dilihat pada kebutuhan tenaga kerja yang mengalami kesulitan (Jan Breman, 1986:8), hal ini disebabkan oleh karena jumlah penduduk yang tidak merata di daerah jajahan Hindia Belanda. Menurut Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, dijelaskan bahwa untuk mengatasi kesulitan akan tenaga kerja tersebut dengan mengadakan pemindahan penduduk dari Jawa menuju ke daerah Sumatera. Adapun alasannya yaitu adanya permintaan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan di Sumatera khususnya di Deli, maka dilakukan usaha transmigrasi (1992:42).

Mengenai bidang irigasi terutama adanya pembangunan saluran irigasi sangat nampak, sehingga peningkatan hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini terbukti dengan

dibangunnya bendungan dan perbaikan saluran air untuk mengairi perkebunan dan persawahan. Mengenai perbaikan saluran irigasi ini dapat dirasakan hasilnya untuk daerah Jawa untuk tanaman tebu, maka daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah sekitar abad ke- 20 merupakan daerah eksploitasi yang utama (1986:42).

Perlu diketahui bahwa untuk usaha pembangunan irigasi yang telah dilakukan dalam politik etis. Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, menyebutkan bahwa telah dibuat saluran irigasi misalnya di Panarukan, Cirebon, Delta Brantas dan Demak (1992:15).

Adapun tujuan dari perbaikan saluran irigasi ini untuk peningkatan hasil pertanian dan perkebunan. Sesuai dengan pendapatnya (Sartono Kartodiedjo, 1985: dan Marwati Djoened ,dkk, 1992:9).

### **2.3 Pengaruh Politik Etis Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jawa**

Setelah mengetahui bahwa politik etis tidak jauh berbeda dengan bentuk kolonialisme dan imperialisme, maka dapat dikatakan bahwa politik etis merupakan imperialis bentuk baru yang mengandung unsur-unsur perluasan daerah dan penanaman modal yang lebih (E. Kosim, 1970:77). Dijelaskan lebih lanjut bahwa imperialisme diolah sehingga menguntungkan kaum imperialis.

Mengenai pengaruh dari pelaksanaan politik etis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa dapat diketahui dari munculnya golongan kaum elit birokrasi Belanda (Bhinnelands Bestuur) yang semakin nyata mengabaikan nilai-nilai lama yang berlaku pada masa ketika para priyayi lebih banyak diberi kelonggaran dalam pemerintah (Leirissa, 1985:15). Lebih lanjut dijelaskan bahwa sikap birokrasi Belanda ini mencapai puncak perkembangannya pada masa pelaksanaan politik etika (politik etis), khususnya

kaum bangsawan. Nantinya banyak bermunculan sikap yang meninggalkan kebudayaan timur yang sudah lama hidup dalam hubungan bermasyarakat, misalnya: mengenai tata pergaulan hidup dalam masyarakat Jawa tentang sopan santun.

Reymond Kennedy menyebutkan ciri pokok dari imperialisme yaitu: 1) membedakan warna kulit (color line); 2) menjadikan tanah jajahan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negeri induk; 3) perbaikan sosial yang sedikit; 4) jarak sosial yang jauh antara penjajah dengan terjajah (C.S.T. Kansil dan Yulianto, 1988:13). Hal ini sesuai dengan kenyataan yang tampak dalam kehidupan sosial masyarakat Hindia Belanda. Keadaan yang demikian dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat Jawa, misalnya perbedaan sikap golongan pribumi dan golongan Indo (golongan keturunan); adanya pengerukan hasil bumi dari daerah jajahan untuk kepentingan negeri induk (negeri Belanda); dan begitu pula untuk perbaikan sosial hanya untuk kepentingan kaum penjajah yaitu memenuhi tenaga kerja yang terdidik dengan ongkos yang relatif murah.

Munculnya politik etis merupakan kesempatan baik bagi golongan kaum elit birokrasi untuk memanfaatkan peluang bagi dirinya dan kepentingan bangsanya. Mengingat pendidikan secara Eropa akan memberikan kesempatan golongan kaum elit birokrasi (golongan priyayi) untuk menyerap pengetahuan baru, misalnya; sosialisme, liberalisme dan demokrasi. Pengetahuan tersebut mempunyai prinsip yang selalu berlawanan dengan paham kolonialisme dan imperialisme. Dijelaskan bahwa dengan pendidikan secara Eropa akan dapat memperluas cakrawala pemikiran dan menciptakan suatu golongan elit baru (golongan priyayi yang terdidik), nantinya dari golongan kaum priyayi ini akan mengembangkan kesadaran kemerdekaan dan persatuan nasional (Leirissa, 1985:21).

Adanya disentralisasi dan ekspansi birokrasi kolonialke dalam lapangan pekerjaan yang baru akan membantu kepada sebagian besar orang terpelajar di Jawa (priyayi) untuk mengabdikan diri kepada pemerintah kolonial (Akira Nagazumi, 1988:29). Dijelaskan lebih lanjut oleh Leirissa tentang tugas dari kaum priyayi yang bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda (pemerintah kolonial). Disamping itu bertugas mengawasi ketentraman pengadilan dan perkebunan serta untuk memelihara kesejahteraan penduduk pribumi (1985:15).

Perlu diketahui bahwa seluruh hasil kekayaan bangsa Indonesia dieksploitasi untuk kepentingan luar negeri yaitu untuk kepentingan negeri Belanda. Sementara itu perlakuan dan sikap pemerintah Belanda terhadap masyarakat pribumi sangat berbeda dan jauh dari tujuan politik etis. Sebagai buktinya yaitu yaitu kepentingan rakyat pribumi sangat diabaikan utamanya dalam bidang ekonomi, akibatnya rakyat pribumi sangat kekurangan bahan makanan.

Keadaan masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20 dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu: 1) golongan Eropa (kelas tertinggi) meliputi golongan orang-orang Belanda dan bangsa Eropa termasuk orang-orang Indo-Eropa; 2) golongan timur asing yang mayoritas terdiri dari orang-orang Cina dan Arab. 3) golongan pribumi, menduduki strata sosial terendah dengan jumlah yang paling banyak. lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk golongan yang ketiga dapat dibagi dalam dua tingkatan yaitu pertama rakyat jelata terdiri dari orang pribumi, orang desa dan orang kampung; kedua, priyayi golongan yang sering disebut dengan elite (bagi orang Indonesia atau Hindia Belanda) Robert Van Niel, 1984:11 dan 30). Sedangkan menurut Leirissa dijelaskan bahwa untuk membedakan antara golongan berdasarkan menurut color line atau garis warna kulit (1985:9). Pemerintah Belanda berusaha mendekati golongan priyayi, karena

status sosial dari golongan priyayi lebih tinggi dari golongan masyarakat biasa (jelata). Hal ini sesuai dengan pendapatnya Poespoprodjo yang menjelaskan bahwa kaum priyayi yang memiliki status yang lebih tinggi dari rakyat jelata mempunyai kemampuan untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat, maka mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengajak golongan elite biokrasi guna mempertahankan kekuasaan kolonial di daerah koloni (Hindia Belanda) (1984:21).

Perlu diketahui bahwa tujuan dari pelaksanaan politik etis adalah memberikan kebahagiaan dan kemakmuran terhadap masyarakat bangsa Indonesia (Hindia Belanda) dengan menyelenggarakan pendidikan, pengairan dan pemindahan penduduk (I. Djahur dan Danasaputra, 1976:135). Bidang pendidikan sangat perlu karena melalui pendidikan akan menjadi tolak ukur percaturan ekonomi masyarakat Hindia Belanda, selain itu dengan status pendidikan juga dapat mempertahankan serta meningkatkan taraf hidup suasana politik kolonial Belanda.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Hindia Belanda (di Jawa) tentang kesejahteraan penduduk pribumi semakin mundur tanpa memperoleh perhatian dari pihak pemerintah Hindia Belanda (Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, 1992:126). Hal ini terbukti bahwa banyak timbulnya masyarakat yang hidup dengan serba kekurangan dalam berbagai kebutuhan.

Ditinjau dari bidang perkonoman di daerah kolonial Belanda sangat menguntungkan pihak swasta, karena dalam bidang perkonoman ini untuk daerah Jawa di samping tanahnya subur juga terdapat banyak tersedianya tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan. Untuk hasil pertanian di daerah Jawa sangat baik guna memenuhi kebutuhan barang ekspor misalnya: tebu dan tembakau (daerah Besuki). Sedangkan untuk hasil perkebunan misalnya: Teh, kopi, nila

dan coklat. Perlu diketahui bahwa pihak swasta yang mendapat keuntungan juga pemerintah Belanda (pemerintah kolonial) sebab buktinya kas negara induk mengalami peningkatan. Sebab pada masa kolonial liberal sejak tahun 1870 akan memberikan dorongan baru menuju pada kemajuan dalam bidang perekonomian.

Dalam bidang budaya, adanya politik etis pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memasukkan pengaruh kebudayaan Barat (paham Belanda) ke dalam kehidupan masyarakat Jawa melalui bidang pendidikan. Menurut Djumhur dan Dana-suparta dijelaskan bahwa tindakan yang diambil yaitu memberikan sifat dan ciri yang mengarah ke Belanda-belandaan pada sekolah kelas I dan kelas II (1978:135).

Pengaruh pelaksanaan politik etis selain tampak dalam bidang budaya juga dalam bidang sosial ekonomi. hal ini terlihat adanya perubahan dalam berbagai aspek yang akan mempengaruhi kedudukan dan status sosial seseorang yaitu nilai yang mendukung stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Harwati Djoned Poesponegoro, 1993:153). Dengan munculnya kaum elit birokrasi yang terpelajar dari kalangan pemuda pribumi, maka mereka akan melontarkan pikiran penciptaan bangsa Indonesia (1993:170).

Dampak adanya perkembangan pengajaran akibat pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda (Indonesia) akan muncul golongan sosial yang baru, contohnya: golongan priyayi yang terpelajar yang mempunyai fungsi dan status baru contohnya pegawai pemerintah Hindia Belanda, hal ini sesuai dengan diferensiasi serta spesialisasi bidang sosial-ekonomi dan pemerintahan (Sartono Kartodirdjo, 1993:80). Akibatnya muncul kekeburean batas-batas otoritas serta suasana yang tidak jauh bedanya dengan keadaan zaman pra-kolonial yaitu dengan adanya hubungan peternalisme dan feodalisme. Pengaruh yang lain juga dalam segmentasi sosio-kultural (1993:86).

#### 2.4 Hipotesis

Secara etimologi hipotesis mempunyai pengertian sebagai suasana yang kurang (hypo) dari suatu kesimpulan pendapat (tesis). Menurut Sumadi Suryabrata dijelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris (1994:69). Secara teoritis dianggap tingkat kebenarannya. Sedang Suharsimi Arikunto mengartikan bahwa hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (1996:67). Menurut Winarno Surachmad, Hipotesis diartikan suatu tuntutan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya dan hipotesis tersebut tidak perlu satu jawaban yang mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penyelidikan walaupun harapannya demikian (1990:107).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis merupakan kesimpulan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian yang sebenarnya masih perlu diuji dengan melalui analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti.

Hipotesis dalam suatu penelitian sangat diperlukan, menurut Young hipotesis yaitu: a) memberi tujuan yang jelas bagi suatu penelitian; b) dapat membantu dalam menentukan arah yang harus ditempuh, misalnya dalam pembatasan ruang lingkup penelitian dengan cara memilih fakta-fakta yang menjadi pokok perhatian dengan menentukan fakta yang relevan; c) dapat menghindarkan dari suatu penelitian yang tidak terarah serta terhindar dari pengumpulan data yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti (Koentjoroningrat, 1991:24).

Bertitik tolak dari tinjauan kepustakaan diatas, maka hipotesis yang sesuai dengan pengaruh pelaksanaan politik etis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa

sangat besar. Hal ini terbukti adanya pengaruh tersebut dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa, misalnya ditandai dengan munculnya kaum terpelajar pada kehidupan masyarakat Jawa; munculnya paham radikalisme dari golongan pemuda; hilangnya sifat kesukuan dan munculnya rasa nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat; selain itu juga diperbaharukannya hukum tradisional tentang pemilikan tanah di Jawa. Jadi pengaruh dari pelaksanaan politik etis dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa dapat digolongkan menjadi dua secara garis besar yaitu pengaruh yang bersifat positif yang nantinya akan berkembang terus dan dipergunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari misalnya tentang peraturan hukum agraria (pemilikan tanah). Sedangkan pengaruh negatif hanya digunakan sebagai contoh dari kekejaman bangsa yang pernah menjajah bangsa Indonesia.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Pengertian Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah kebenaran suatu metode sangat diperlukan agar tujuan penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien. Kata metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. secara ilmiah metode berkaitan erat dengan masalah cara kerja. Metode dapat dicitakan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian (Mardalis, 1993:24).

Penelitian berasal dari kata *research* dalam bahasa Inggris dan berarti menilai kembali. Menurut Mardalis penelitian adalah sebagai upaya alam bidang ilmu pengetahuan yang diujalakan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran tersebut (1993:24). Sutrisno Hadi menyebutkan bahwa penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana usaha tersebut dilakukan dengan metode-metode ilmiah (1989:4). Selanjutnya Moh. Ali menjelaskan pengertian metode yang dihadapi atau untuk memperoleh suatu pengetahuan, sebagai dasarnya adalah metode ilmiah (1982:21). Menurut Moh. Nasir definisi *research* secara etimologi mempunyai arti mencari kembali (1985:13).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari metode penelitian yaitu suatu cara atau teknik yang dipakai oleh seorang peneliti untuk menemukan, menganalisis, menginterpretasikan serta memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah.

Metode penelitian menurut Moh. Nazir adalah sebagai pemandu penelitian tentang urutan-urutan bagaimana penelitian harus dilakukan serta alat-alat apa yang digunakan

(1988:85). Seorang peneliti dalam melakukan kegiatannya diperlukan suatu panduan agar hasil penelitiannya dapat memenuhi kebenaran secara umum. Selain itu metode penelitian dapat diartikan cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian guna mencapai tujuan penelitian (Kartini Kartono, 1990:20).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan hati-hati dan sempurna guna untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara ilmiah.

Metode penelitian menurut Winarno Surachmad dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu: a) metode penelitian historik; b) metode penelitian eksperimen; c) metode penelitian diskriptif (1990:29). Lebih lanjut dijelaskan bahwa metode penelitian secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu: a) metode penelitian sejarah; b) metode penelitian deskriptif; c) metode penelitian eksperimen; d) metode penelitian tindakan; e) metode penelitian grounded research (Moh. Nazir, 1989:54-55).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah. Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian historik. Moh. Nazir menyebutkan bahwa dalam penelitian historik ada empat macam yaitu: 1) penelitian sejarah komparatif; 2) penelitian yuridis atau legal; 3) penelitian biografi; 4) penelitian bibliografi (1985:61).

Berpedoman dari pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian bibliografi, dengan alasan bahwa sumber-sumber yang diperoleh kebanyakan berupa buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan. Maksudnya penelitian ini dengan menggunakan sumber-sumber beberapa buku atau bahan lainnya yang terdapat dalam perpustakaan

(library), penelitian ini dalam bahasa Inggris disebut dengan Library Research. Jadi bahan yang digunakan terbatas hanya pada buku-buku saja dan berupa bahan-bahan tertulis lainnya (Hadari Nawawi, 1991:30).

### 3.2 Pengertian Penelitian Sejarah

Metode penelitian sejarah adalah merupakan kajian logis terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dengan mendasarkan pada gambaran tertulis maupun lisan (Tatang M. Arifin, 1990:110). Selain itu Nugroho Notosusanto yang mengutip pendapat Gilbert J. Garragan memberi pengertian metode penelitian sejarah adalah merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis, maksudnya untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi penelitian sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sistesa dari hasil-hasil penelitian tersebut berupa bentuk tulisan (1984:10-11). Sedangkan menurut Louis Gottschalk dijelaskan bahwa metode penelitian sejarah merupakan suatu proses menguji atau menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lampau (1986:32). Moh. Nazir menjelaskan bahwa penelitian dengan menggunakan metode sejarah merupakan penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan perkembangan serta pengalaman dimasa lampau dan menimbang secara cermat, teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber-sumber tersebut (1985:55-56). Disamping itu ada pendapat yang menyebutkan bahwa metode sejarah merupakan suatu prosedur kerja sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan pada masa lampau (Nugroho Notosusanto, 1971:17). Menurut Moh. Ali dijelaskan bahwa metode penelitian sejarah sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan cara atau jalan meninjau suatu permasalahan dari perspektif sejarah berdasarkan pada peninggalan atau dokumen sejarah yang ada (1982:111).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah suatu alat yang dipakai oleh sejarawan (peneliti sejarah) yang berbentuk prinsip dan aturan tentang prosedur cara kerja untuk menuliskan peristiwa masa lampau melalui konstruksi imajinatif yang berdasarkan bahan-bahan serta jejak peristiwa masa lampau. Berkaitan dengan penelitian ini menurut Nugroho Notosusanto dijelaskan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode penelitian sejarah yaitu: a. heuristik, b. kritik, c. interpretasi, dan d. historiografi (1971:17).

### 3.2.1 Heuristik

Tahap heuristik merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian sejarah. Menurut Sutrasno heuristik merupakan langkah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber fakta sejarah yang akan digunakan untuk penelitian sejarah atau mencari sesuatu yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah (1975:45). Mengingat bahan sejarah hanya berupa jejak-jejak peristiwa masa lampau tersebut kita harus mengumpulkan data-data. Selain itu heuristik juga diartikan mencari atau menemukan sumber-sumber sejarah (I.G. Widja, 1988:19).

Sejalan dengan pengertian tersebut diatas, kata heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein yang mempunyai arti menemukan sumber-sumber (Nugroho Notosusanto, 1971:18). Hal ini didukung oleh pendapat Soeri Soeroto yang mengartikan heuristik dengan menemukan isi sumber tersebut (1980:5). Jadi, dari uraian diatas dapat diartikan, berusaha untuk menemukan isi sumber-sumber dari peristiwa masa lampau. Berkaitan dengan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa heuristik mempunyai arti suatu proses pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang biasanya hanya berupa jejak-jejak masa lampau untuk diproses menjadi fakta-fakta.

Sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: 1) sumber berupa benda-benda (contohnya: bangunan, senjata dan perabotan rumah tangga); 2) sumber lisan (biasanya berupa hasil wawancara dari pelaku peristiwa sejarah); 3) sumber tertulis (sering disebut dengan dokumen dapat berupa: surat keputusan, piagam dan surat perjanjian) (Nugroho Notokusanto, 1971:18 dan Soeri Soeroto, 1980:5).

Berkaitan dengan pendapat diatas, maka penulis menggunakan sumber tertulis yang berupa buku-buku atau sumber lain yang memuat pendapat para ahli sejarah. Mengenai sumber tertulis terdapat dua jenis sumber primer dan sumber sekunder, Louis Gottschalk menjelaskan bahwa sumber sekunder adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau sebagai pelakunya peristiwa sejarah. Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang diisahkan dan orang tersebut memperoleh sumber dari cerita atau berita dari orang lain (1986:35).

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis banyak menggunakan sumber sekunder sebab selain mudah memperoleh juga memberikan informasi serta data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber aslinya (Kartini Kartono, 1991:73). Guna menyusun suatu karya tulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: 1) sumber pokok; 2) sumber penunjang. adapun yang dimaksud dengan sumber pokok yaitu sumber dalam yang sering kali banyak dipakai atau menjadi acuan pokok dalam memecahkan permasalahan yang dibahas. Sedangkan sumber penunjang yaitu sumber yang dipakai hanya sebagai tambahan yang menunjang dari sumber pokok.

### 3.2.2 Kritik

Langkah yang dilakukan dalam tahap kedua ini yaitu kritik. Tahap ini merupakan tahap memilah-milah dan meng-

kaji sumber-sumber yang telah diperoleh untuk mengetahui bahwa sumber tersebut benar-benar asli serta dapat dipercaya atau tidak kebenarannya (Winarno Surachmad, 1990:135). Maksudnya setelah penelitian berhasil menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak sejarah kemudian melakukan pemisahan atau pemilihan sumber mana yang dapat dipakai guna menulis hasil penelitian. Nugroho Notosusanto menjelaskan bahwa melakukan pengujian terhadap sumber-sumber sejarah dengan harapan agar diperoleh fakta-fakta sejarah, karena sumber sejarah tersebut masih merupakan bahan-bahan mentah yang harus diolah lebih lanjut untuk disusun menjadi fakta-fakta sejarah (1971:14). Menurut Louis Gottschalk disebutkan tentang fakta sejarah yaitu suatu unsur yang dijabarkan secara langsung dokumen-dokumen sejarah serta dianggap kredibel setelah melalui pengujian yang eksama sesuai dengan ketentuan metode sejarah (1986:96). Maksudnya yaitu dari fakta-fakta sejarah agar dapat diakui keaslian dan kebenarannya harus melalui pengujian yang sering disebut dengan kritik.

Perlu diketahui bahwa di dalam langkah kritik terhadap sumber sejarah mempunyai dua macam yaitu: 1) kritik ekstern, merupakan kritik yang dilakukan untuk mengetahui apakah sumber sejarah itu asli atau tiruan; 2) kritik intern, yaitu kritik yang dilakukan untuk meneliti kebenaran dari isi sumber sejarah tersebut (Winarno Surachmad, 1990:35). Maksud bahwa kritik ekstern berkaitan dengan sumber itu dapat memberi informasi yang dibutuhkan bagi para peneliti, sedangkan kritik intern digunakan untuk membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh sumber sejarah tersebut dapat dipercaya. Untuk pembuktian sumber sejarah tersebut menurut Nugroho Notosusanto dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut: a) penilaian intrinsik dari sumber-sumber sejarah tersebut; b) membandingkan kesaksian dari sumber sejarah (1971:21).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa langkah kritik ini dalam penelitian sejarah merupakan suatu kegiatan untuk menilai, menguji atau menyeleksi sumber sejarah yang nantinya akan diperoleh jejak atau sumber sejarah yang benar, asli, autentik dan keutuhan sumber informasi yang diberikan akhirnya dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.2.3 Interpretasi

Langkah ketiga dari metode sejarah adalah interpretasi, dapat disebut juga dengan penafsiran. Adapun pengertian interpretasi yaitu suatu langkah menetapkan makna dan saling berhubungan antara fakta-fakta yang dihimpun. Sedangkan berbagai fakta yang terlepas satu sama yang lainnya dirangkaikan, dihubungkan sehingga menjadi kesatuan yang harmonis dan logis (Nugroho Notokusanto, 1971: 17-23). Menurut I.G. Widja disebutkan bahwa fakta-fakta sejarah yang telah diwujudkan itu perlu dihubungkan dan dikait-kaitkan antara satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga merupakan suatu rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan kesesuaian (1988:23). Berkaitan dengan uraian ini, maka rangkaian yang bermakna dari gejala-gejala, gagasan atau peristiwa yang ditulis pada masa lampau selain itu juga tersusun secara sistematis, kronologis dan logis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa interpretasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh suatu hasil penulisan kisah sejarah secara obyektif. Adapun caranya dengan merangkai-kan dan mengkaitkan fakta-fakta peristiwa sejarah di masa lampau secara rasional, sistematis dan kronologis.

### 3.2.4 Historiografi (Penyajian)

Langkah historiografi merupakan langkah terakhir dari metode penelitian sejarah. Penyajian berusaha merekonstruksi yang imajinatif dari peristiwamasa lampau atau usaha menginterpretasikan fakta menjadi suatu kisah (Louis Gottechalk, 1986:33). Perlu diketahui bahwa kegiatan penulisan sejarah menjadi kisah sajarah sebagai hasil dari interpretasi fakta-fakta sejarah yang telah dihimpun. Mengenai bentuk dari penyajian tersebut berupa laporan tertulis dengan cara merangkai fakta peristiwa secara logis, sistematis dan kronologis. Dalam penuisan ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk menyajikan hasil penelitian. Maksudnya yaitu prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki berdasarkan fakta-fakta, sebagai mana adanya dengan penekanan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek penyelidikan (Hadari Nawawi, 1991:63).

Suatu pendapat mengatakan bahwa metode deskriptif bukan saja memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan kemudian membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan (Moh. Nazir, 1989:64). Jadi maksudnya dengan metode deskriptif ini berusaha ntuk memberikan gambaran seobyektif mungkin terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Historiografi dengan metode deskriptif ini merupakan suatu usaha untuk melukiskan peristiwa-peristiwa yang menjadi obyek penelitian sejarah secara logis, sistematis dan kronologis. adapun caranya dengan mengkaitkan fakta-fakta sejarah sebagai hasil penafsiran atau interpretasi atas fakta-fakta tersebut. Sehingga akhirnya dapat terwujud suatu kisah sejarah yang bersifat ilmiah.

### 3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, tempat penelitian yang dipakai ialah perpustakaan-perpustakaan. Untuk menentukan tempat penelitian penulis menggunakan metode purposive sampling. Maksudnya yaitu pengambilan sampel atau pemilihan kelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sutrisno Hadi, 1988:82). Mengingat banyak bahan yang dapat dipakai sebagai sumber penulisan, maka untuk memilih dan menentukan bahan sumber yang sesuai dengan tujuan penelitian menggunakan metode pengambilan contoh dan memilih subyek berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan berhubungan dengan obyek penelitian.

Selain itu penulis menentukan dengan sengaja yang berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang telah diperoleh dari informasi terdahulu (Previous knowledge) dan secara intensional hanya mengambil beberapa perpustakaan tertentu, khususnya yang dianggap oleh penulis dengan pasti terdapat buku-buku yang diperlukan dalam penelitian. Jadi penentuan tempat atau perpustakaan sebagai tempat penelitian berdasarkan informasi sebelumnya bahwa tempat-tempat tersebut dapat menyediakan sumber-sumber yang dapat memecahkan permasalahan dan membuktikan hipotesis yang telah penulis ajukan sebelumnya.

Sebagai populasi penelitian di kota administratif Jember terdapat banyak perpustakaan diantaranya yaitu: perpustakaan daerah Kabupaten Jember, perpustakaan pusat Universitas Jember, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Laboratorium pendidikan sejarah FKIP Universitas Jember.

Setelah mengetahui betapa banyak jumlah perpustakaan yang dapat dipakai sebagai tempat penelitian, maka penulis untuk mempersempit ruang lingkup kerja penelitian menentukan tempat penelitian sebagai berikut: a) Perpustakaan Pusat Universitas Jember; b) Perpustakaan Fakultas sarta Universitas Jember; c) Laboratorium Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember. selain itu penulis juga menggunakan buku-buku koleksi pribadi.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumenter. Maksudnya dari metode dokumenter yaitu cara pengumpulan data dari peninggalan tertulis terutama berupa arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat-pendapat serta teori-teori, hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (Hadari Mawawi, 1991:33). Lebih lanjut Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa metode dokumenter adalah metode penelitian yang menggunakan sumber tertulis sebagai datanya (1992:169).

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa metode dokumenter merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan sumber data berupa buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya. Perlu diketahui bahwa dalam penelitian sejarah ada dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Namun jika sumber sekunder tidak diperoleh, maka sumber sekunder dapat digunakan untuk mengulas suatu permasalahan dalam penelitian bidang sejarah.

Kartini Kartono menjelaskan bahwa sumber informasi dokumenter yang bersifat sekunder berfungsi hanya memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber aslinya (1991:73). Mengenai sumber sekunder ada yang menjelaskan bahwa sumber sekunder dapat dipakai bila sumber primer tidak dapat diperoleh

(Winarno Surachmad, 1990:125). Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa jika sumber pencarian sumber primer sudah tidak dapat diperoleh sebagai penggantinya dapat dipakai sumber sekunder tanpa mengurangi keaslian dari data-data sejarah tersebut.

Menurut beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sejarah menggunakan metode dokumenter untuk memperoleh data-data yang diperlukan, sedangkan sumber fakta sejarah ada dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Sebagai langkah berikutnya dalam penelitian ini yaitu menganalisa serta menghubungkan data-data yang masih terpisah-pisah guna diinterpretasikan kembali sehingga akan menghasilkan suatu kisah sejarah dalam bentuk tertulis yang berurutan secara kronologis. Perlu diketahui bahwa langkah menganalisis data dalam penelitian selalu berkaitan dengan kritik dan interpretasi, karena di dalam proses analisis tersebut juga dilakukan kritik bahan serta menginterpretasikan dengan bahan yang lainnya dengan harapan akan diperoleh suatu hasil yang benar-benar mendekati keaslian dari peristiwa sejarah tersebut.

Metode yang dipakai penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu metode filosofik dengan menggunakan teknik logika komparatif dan induktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadari Nawawi yang menyebutkan bahwa metode filosofik yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional analisis sistematis berdasarkan pada berfikir yang induktif dan dengan memperhatikan hukum-hukum berfikir yang logis (1991:62). Cara kerja dari metode filosofik dengan menggunakan data kualitatif, sehingga dalam pemecahan permasalahan dan pengujian hipotesisnya bersifat apriori, makaudnya berdasarkan kenyataan serta dapat diterima oleh akal.

Jadi yang dimaksud dengan metode filosofik dalam penelitian ini yaitu suatu cara atau teknik yang digunakan peneliti untuk memecahkan permasalahan secara rasional dengan menggunakan cara berfikir terarah menurut aturan-aturan yang tepat untuk mencapai kebenaran. Untuk menerapkan metode filosofik dalam penelitian sejarah ini penulis menggunakan teknik logika komparatif dan induktif.

### 3.5.1 Teknik Logika Komparatif

Merupakan suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara membanding-bandingkan data yang ada. menurut Moh. Ali dikatakan bahwa teknik logika komparatif yaitu teknik membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor atau situasi yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa (1982:132). Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa teknik logika komparatif adalah suatu cara yang dipergunakan untuk menghubungkan lebih dari satu fenomena yang sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan (Winarno Surachmad, 1990:143).

Studi logika komparatif digunakan dalam penelitian sejarah untuk memilih dan meneliti hubungan fenomena sejenis yang lebih dari satu guna memperoleh unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari suatu peristiwa sejarah. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik logika komparatif merupakan suatu cara untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya suatu peristiwa, hubungan satu fenomena dengan yang lainnya dengan cara membanding-bandingkan persamaan dan perbedaan guna memperoleh fakta-fakta dari suatu peristiwa sejarah yang dapat dirangkaikan menjadi satu kisah sejarah.

### 3.5.2 Teknik Logika Induktif

Sedangkan pengertian teknik logika induktif adalah cara berfikir yang berlandaskan pada pengetahuan yang khusus, peristiwa-peristiwa konkret tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum (Sutrisno Hadi, 1986:42). Menurut Hadari Nawawi dijelaskan bahwa teknik logika induktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum (1991:16). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa teknik logika induktif merupakan suatu proses berfikir untuk memperoleh kesimpulan yang beranjak dari hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum (Moh. Ali, 1982:18). Menurut Poepoprodjo dan T. Gilarsa mengemukakan bahwa teknik logika induktif merupakan cara proses penilaian dari pengetahuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang lebih konkret dan khusus kemudian disimpulkan menjadi pengetahuan yang bersifat umum (1985:15). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa suatu pengetahuan yang umum berawal dari kejadian-kejadian atau peristiwa yang kongkrit dan bersifat khusus.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik logika induktif merupakan cara berfikir dengan mendasarkan diri pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi suatu konklusi atau kesimpulan yang bersifat umum, dengan kata lain dapat dikatakan berfikir induktif merupakan cara berfikir dari sesuatu yang bersifat khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan teknik logika komparatif dan logika induktif dalam penelitian ini yaitu suatu cara yang dipakai dalam memecahkan suatu permasalahan secara rasional menurut aturan penalaran yang tepat dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai fenomena yang timbul kemudian

ditarik menjadi generalisasi yang bersifat umum yang akhirnya terwujud suatu kebenaran. dengan demikian dapat diperoleh suatu kesimpulan yang berawal dari persoalan yang khusus kemudian mengarah ke suatu kesimpulan yang bersifat umum. Sehingga nantinya akan menghasilkan analisis yang logis, sistematis dan kronologis. Sebagai langkah terakhir yaitu dituangkan dalam bentuk tulisan.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan di bab iv, maka dapat diambil kesimpulan tentang pengaruh dari pelaksanaan politik etis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa tahun 1901-1942, yaitu ditandai dengan munculnya golongan intelektual pada stratifikasi sosial, yaitu melalui bidang pendidikan yang dapat mengangkat derajat masyarakat Jawa; ditandai dengan perbaikan hukum agraria tentang sewa menyewa tanah dalam kehidupan masyarakat Jawa; dan munculnya rasa kebangsaan yang ingin membentuk suatu negara kesatuan negara yang merdeka.

### 5.2 Saran-saran

Berkaitan dengan hasil penelitian (kesimpulan) di atas, agar dapat memberi manfaat seperti yang penulis harapkan di muka, maka pada akhir kesempatan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. kepada Peneliti Sejarah, berhubung sifat manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kelupaan, maka penulis mengajukan saran, ajakan dan harapan untuk memberikan koreksi dari isi hasil karya ini. Apabila ditemukan dan diperoleh fakta sejarah yang terlewat serta ada relevannya dengan penulisan bahan.
2. bagi Sejarawan Pendidik, menghimbau agar tetap selektif dalam mengadakan seleksi buku-buku sejarah yang akan dipakai sebagai sarana pengajaran tanpa dipengaruhi sikap subyektif, sehingga sesuai dengan harapan yang hendak dicapai.
3. bagi pembaca umumnya, hasil penulisan ini dapat menjadi suatu sarana tambahan pengetahuan bagi pembaca dan bermanfaat tentang isi dari hasil karya ini.

## KEPUSTAKAAN

- Anonia. 1985, Pendidikan Sejarah Jawa Timur. Depdikbud, Jakarta
- Burger. D.H, 1962, Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia Jilid I, (Terj. Prajudi Atmosudirdjo), Pradnya Paramita, Jakarta \*)
- Baudet, H dan I.J Brugnans, 1987, Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Bremen. Jan, 1988, Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Di Masa Kolonial. Pradnya Paramita, Jakarta
- E. Kosim , 1970, Seminar Sejarah Nasional II. Fakultas Sastra Universitas Pajajaran, Bandung
- C.S.T. Kansil dan Yulianto, 1988, Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Erlangga, Jakarta.
- G. Moedjanto, 1988, Indonesia Abad ke-20 Jilid I Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati, Kanisius, Yogyakarta
- Gottschalk, Lois, 1986, Mengerti Sejarah. (Terj. Nugroho Notosusanto), Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Hassan Shadily, 1983, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia Rineka Cipta, Jakarta \*)
- I. Djumhur dan Danasuparta, 1956, Sejarah Pendidikan. CV. Ilmu, Bandung
- Kartini Kartono, 1980, Pengantar Metodologi Riset sosial, Buana Angkasa, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1985, Metodologi Penelitian Masyarakat. Gramedia, Jakarta
- Leirissa. RZ, 1985, Sejarah Masyarakat Indonesia 1890-1950, Akademika Persindo, Jakarta \*)
- Mardalis, 1980, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Melton Putra, Jakarta
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1983, Sejarah Nasional Jilid IV, Balai Pustaka, Jakarta
- , 1983, Sejarah Nasional Jilid V, Balai Pustaka Jakarta \*)

- Mohamad Ali, 1982, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Angkasa, Bandung
- Mohammad Nazir, 1985, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nagazumi Akira, 1986, Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang, Yayasan Obor, Jakarta
- Niel Robert. Van, 1984, Munculnya Elit Modern Indonesia. (Terj. Zahara Deliar Noer), Pustaka Jaya, Jakarta
- Nugroho Notosusanto, 1971, Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah, Pusat Sejarah ABRI-Departemen Pertahanan dan Keamanan, Jakarta
- Sartono Kartodirdjo, 1993, Pengantar Sejarah Indonesia Baru Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Gramedia, Jakarta
- Slamet Hulyana, 1986, Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Suhartoyo Hardjosatoto, 1985, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, Liberti, Yogyakarta \*)
- Sutrisno Hedi, 1986, Metodologi Research Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Sutrasno, 1975, Sejarah dan ilmu Pengetahuan (History and Science), Pradnya Paramita, Jakarta
- Tatang H. Amirin, 1990, Menyusun Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Rajawali Press, Jakarta
- Winarno Surakhmad, 1990, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Transito, Bandung
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

---

(\*) : Buku Pokok

## Matrik Penelitian

TEMA	JUDUL	JENIS DAN SIFAT	MASALAH	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS
Sejarah Nasional Indonesia	Pengaruh Pelaksanaan Politik Etis Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jawa Tahun 1901-1942	Jenis Penelitian : Penelitian Historik Sifat Penelitian: Studi Kepustakaan	Bagaimana pengaruh pelaksanaan politik etis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa tahun 1901-1942 ?	Buku Pokok 5 buah Buku Penunjang 24 buah	1. Metode Penentuan Tempat Penelitian: Purposive Sampling 2. Metode Pengumpulan Data: Dokumenter 3. Metode Analisa Data: Filosofik dengan teknik: 3.1 Logik Komparatif 3.2 Logika Induktif	Pengaruh pelaksanaan politik etis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa tahun 1901-1942 ditandai dengan munculnya: kaum terpelajar yang dapat mengangkat derajat masyarakat Jawa; diperbaharui hukum tradisional (pengganti hukum agraria tentang sistem pemilikan tanah) di Jawa; timbulnya rasa nasionalisme dalam masyarakat Jawa.

Lampiran 2 :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
UPT PERPUSTAKAAN

Surat Keterangan Studi Literatur  
Nomor: 519 /PT.32 H.16 / 9120/97

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan Universitas Jembr. menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Suprayitno  
NIM : 8802105309  
Mahasiswa : Program Studi Sejarah FKIP Universitas Jember  
Angkatan : 1988

Terhitung mulai bulan Nopember 1996 sampai dengan bulan Maret 1997 telah mengadakan studi literatur di perpustakaan Universitas Jember, dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal	Tempat			
	R. SIKULASI	R. REFERENSI	R. OR	R. SKRIPSI
29 Nopember 1996	X	-	X	X
30 Nopember 1996	X	-	X	-
1 Desember 1996	X	X	-	-
3 Januari 1997	X	X	X	-
2 Januari 1997	-	-	-	X
3 Januari 1997	X	X	-	-
4 Januari 1997	X	X	X	-
5 Januari 1997	-	-	-	X
4 Maret 1997	X	X	-	-

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Jember, Desember 1997  
a.n Kepala  
Subag TU Perpustakaan



Budiwati, S. Sos

NIP. 130 683 181

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTIRAS

1. Nama : SUPRAYITNO
2. Tempat/Tanggal lahir : Madiun, 13 Nopember 1967
3. Agama : Islam
4. Nana Ayah : SALEH
5. Nama Ibu : Djamilah
6. Alamat
  - a. Asal : Jln. Diponegoro 39 Madiun
  - b. Jember : Jln. Kalimantan VI/14 Jember

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Sekolah	Tempat	Tahun Lulus
1.	SD Negeri Madiun Lor VI	Madiun	Tahun 1980
2.	SLTP Negeri V	Madiun	Tahun 1985
3.	SLTA Negeri III	Madiun	Tahun 1988

C. KEGIATAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Tempat	Tahun
1.	Pramuka	Madiun	Tahun 1985
2.	Pecinta Alam	Jember	Tahun 1989
3.	Karang Taruna	Madiun	Tahun 1989

